

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses yang bertujuan untuk memajukan aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur di suatu wilayah atau negara, dengan harapan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperbaiki kualitas hidup manusia secara umum. Awalnya, proses pembangunan di negara-negara berkembang diidentikkan hanya memandang dari aspek ekonomi saja yaitu dengan usaha meningkatkan pendapatan per kapita atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Indikator berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu negara semata-mata hanya dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional. Pada akhir dasawarsa 1960-an, negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada fase awal pembangunan seringkali menghadapi tantangan seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ketidakseimbangan struktural. Munculnya masalah-masalah tersebut menimbulkan pemikiran bahwa pertumbuhan tidak identik dengan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat yang diperlukan tetapi tidak mencukupi untuk suatu proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja pendapatan nasional sebagai sasaran pembangunan, tetapi lebih memusatkan perhatian pada kualitas proses pembangunan (Kuncoro, 2010).

Teori pembangunan manusia muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan konvensional yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Pada tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) mengeluarkan Human Development Report (HDR) pertama, yang memperkenalkan gagasan tentang pembangunan manusia. Dalam laporan tersebut, UNDP menegaskan bahwa sumber daya paling berharga bagi suatu negara adalah modal manusia. Konsep pembangunan manusia mengidentifikasi manusia sebagai tujuan utama dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai faktor yang terlibat dalam pembangunan. Oleh karena itu, dalam pandangan pembangunan

manusia, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki umur lebih panjang, kesehatan yang lebih baik, dan produktivitas yang lebih tinggi (UNDP, 1990). Teori pembangunan manusia menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan manusia dalam satu kerangka kerja yang lebih holistik. Fokusnya adalah pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memastikan akses yang lebih merata terhadap sumber daya dan peluang, dan mempromosikan hak asasi manusia.

Pembangunan kini tengah marak dan giat digaungkan dan dilakukan dengan berbagai kebijakan pemerintah dunia yang tentunya mampu menjadi acuan perkembangan suatu negara. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2015 untuk menjawab tantangan multidimensional yang dihadapi umat manusia. Terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, SDGs mencakup berbagai aspek penting seperti penghapusan kemiskinan, kelaparan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, pekerjaan layak, serta perlindungan lingkungan hidup. Tujuan-tujuan ini saling berkaitan dan dirancang untuk mendorong pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Prinsip utama yang mendasari pelaksanaan SDGs adalah “*no one left behind*”, yang menegaskan pentingnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Meskipun telah dicapai beberapa kemajuan, laporan perkembangan terkini menunjukkan bahwa banyak target masih belum berada pada jalur yang sesuai, sehingga dibutuhkan komitmen dan percepatan kerja sama lintas sektor agar SDGs dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat (United Nations, 2023).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan, termasuk peningkatan kualitas hidup manusia. Tiga tujuan dalam SDGs yang memiliki keterkaitan langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tujuan ketiga, keempat, dan kedelapan. Tujuan ketiga, yaitu Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan, berfokus pada

peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan akses terhadap layanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit, serta peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Adapun tujuan keempat, yaitu Pendidikan Berkualitas, menekankan pentingnya akses terhadap pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua orang, yang sejalan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dalam IPM. Sementara itu, tujuan kedelapan, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, mendorong penciptaan lapangan kerja yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga tujuan tersebut selaras dengan tiga dimensi utama dalam pengukuran IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, pencapaian tujuan ketiga, keempat, dan kedelapan dalam SDGs akan berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah.

Berdasarkan analisis menggunakan metodologi *Interpretative Structural Modeling* (ISM) menemukan hasil bahwa 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut ada keterkaitan antara satu dan lainnya. Hasil analisis tersebut dari 17 tujuan di kerucutkan menjadi empat fokus utama dalam kebijakan SDGs yaitu pendidikan, efisiensi energi ganda, kesehatan dan energi terbarukan (Kementrian PPN/Bappenas, 2017). Dua dari empat fokus tersebut merupakan target pembangunan berkelanjutan yang berfokus kepada pembangunan manusia. Oleh karena itu dengan mencapai tujuan SDGs, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam pembangunan manusia di seluruh dunia. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas hidup dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencapai perkembangan dalam sektor pembangunan manusia, yang dapat diamati dari peningkatan terus-menerus dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, Indonesia berhasil lepas dari kategori IPM sedang, dan sejak tahun 2017 hingga saat ini, Indonesia telah mencapai kategori IPM tinggi. Dalam laporan *Human Development Report 2025*, Indonesia menempati peringkat ke-113 dari 193

negara dalam IPM pada tahun 2023, dengan nilai sebesar 0,728 (UNDP, 2025). Adapun pada tahun sebelumnya, yaitu 2022, Indonesia berada pada peringkat ke-112 dengan nilai IPM sebesar 0,713 (UNDP, 2024). Meskipun terjadi peningkatan nilai IPM, peringkat Indonesia secara global mengalami sedikit penurunan, yang kemungkinan disebabkan oleh kemajuan lebih cepat di negara lain. Walau masih dalam IPM dalam kategori tinggi, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga, yaitu Singapura yang menempati peringkat 13 dari 193 negara dengan besaran IPM 0,946 pada tahun 2023. Selanjutnya Malaysia di peringkat 67 dari 193 negara dengan besaran nilai 0,819. Kedua negara tersebut dikategorikan negara dengan IPM kategori sangat tinggi. Hal tersebut mencerminkan bahwa Singapura dan Malaysia unggul dalam dimensi pembangunan manusia dibanding Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus terus berbenah untuk meningkatkan pembangunan manusia dan memperbaiki sistem kesehatan, pendidikan, dan ekonomi agar dapat mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara tetangga.

Secara geografis, Pulau Sumatera berada di wilayah kedaulatan Indonesia dan dikenal sebagai pulau terbesar keenam di dunia. Luas wilayahnya tercatat mencapai sekitar 473.481 km², menjadikan Sumatera sebagai salah satu kawasan dengan potensi sumber daya alam dan demografi yang besar di tingkat nasional maupun global. Wilayah ini dibagi menjadi 10 provinsi, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, serta Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Pulau Sumatera memiliki keragaman hayati dan didiami oleh penduduk dengan beragam budaya. Dengan latar belakang tersebut tentunya secara tidak langsung mempengaruhi diferensiasi pada Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Pulau Sumatera. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), empat provinsi di Pulau Sumatera termasuk dalam sepuluh provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Riau. Provinsi dengan IPM tertinggi di Pulau Sumatera tahun 2023 di tempati Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 79,08. Sedangkan yang terendah di tempati oleh Provinsi Lampung dengan nilai 72,48, yang berarti ketimpangan IPM tertinggi dan terendah di Pulau Sumatera pada tahun

2023 sebesar 6,60. Jika dibandingkan dengan satu dekade yang lalu yaitu tahun 2012, Provinsi Kepulauan Riau telah menempati posisi IPM tertinggi yaitu dengan nilai 72,36, sedangkan provinsi dengan IPM terendah masih di tempati oleh Provinsi Lampung dengan nilai 64,87. Hal ini berarti ketimpangan IPM tertinggi dan terendah di Pulau Sumatera pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,49. Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan IPM di Pulau Sumatera seiring tahun mengecil.

Walaupun terdapat ketimpangan pada IPM di Pulau Sumatera, berdasarkan data dalam kurun waktu lima tahun terakhir IPM di Pulau Sumatera menunjukkan tren positif, dimulai pada tahun 2019 IPM rata-rata provinsi di Pulau Sumatera sebesar 71,79, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 71,83, lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,24 nilai indeks menjadi 72,07, selanjutnya di tahun 2022 naik menjadi 72,66 dan terakhir di tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2,07 nilai indeks menjadi 74,73.

Seiring dengan era digitalisasi, peningkatan IPM saling terkait dengan konsep *Knowledge Economy* (Ekonomi Pengetahuan) yang berfokus pada inovasi, pendidikan, dan teknologi. Konsep *Knowledge Economy* mulai berkembang pada akhir abad ke-20, seiring dengan meningkatnya peran informasi dan teknologi dalam perekonomian global. Pada tahun 1990-an, para ekonom dan peneliti mulai menyoroti pentingnya pengetahuan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi, menggantikan faktor-faktor tradisional seperti padat modal dan padat karya menjadi era teknologi (Bank, 2016). Ekonomi pengetahuan mendorong pengembangan keterampilan dan pengetahuan baru yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, sehingga menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Selain itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

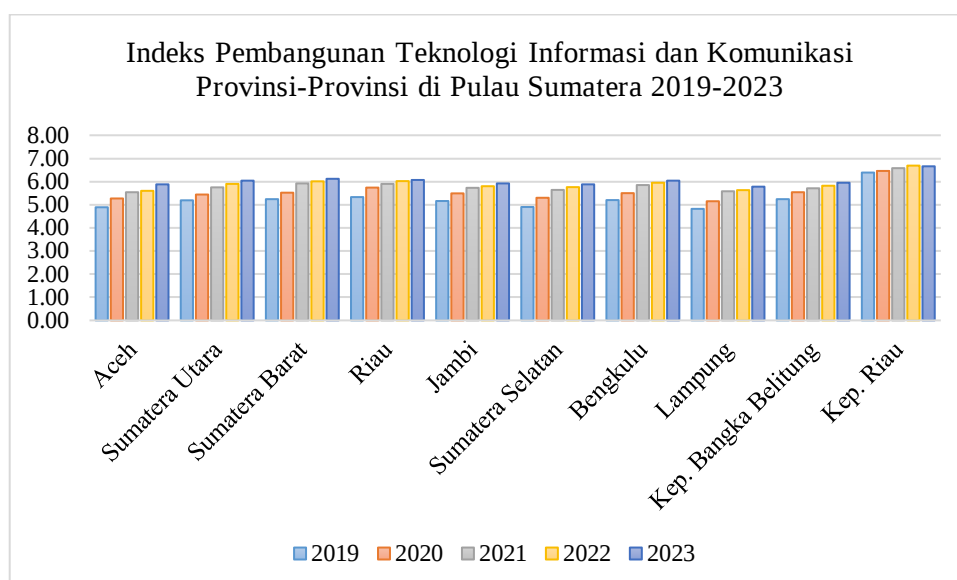
Kemajuan dalam ekonomi pengetahuan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang merupakan komponen kunci dalam perhitungan IPM guna menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera

dan berdaya saing. Peranan dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mencapai tujuan ini menjadi krusial, karena TIK merupakan jembatan penghubung antara kemajuan ekonomi pengetahuan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bahkan di dalam diskusi ilmiah serta kebijakan terkini, yang menjadi fokus utama yaitu pada investasi dalam infrastruktur (seperti transportasi dan TIK) guna meningkatkan pembangunan manusia yang inklusif di negara-negara berkembang (Acheampong et al., 2022).

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan yang dirasakan baik itu pada negara maju maupun negara berkembang. Melalui beberapa cara diantaranya dengan mengakses kemajuan TIK, yaitu pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, platform digital dan lain sebagainya, yang mempermudah akses pada informasi di bidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan dan peluang ekonomi, sehingga secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Pada dimensi kesehatan adanya peningkatan teknologi medis dan inovasi dalam bidang kesehatan seperti konsultasi online melalui aplikasi kesehatan yang dapat meningkatkan layanan kesehatan, diagnosis, dan pengobatan. TIK juga memfasilitasi penelitian medis contohnya pengembangan vaksin, peralatan medis canggih, dan sistem informasi kesehatan yang dapat membantu dalam pencegahan dan pengobatan penyakit pada pasien secara efektif dan efisien, tentu akan berdampak pada peningkatan angka harapan hidup. Adapun pada dimensi pendidikan, TIK juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti *e-learning*, platform belajar online, aplikasi edukasi, perpustakaan online yang menyediakan *e-book*, artikel, jurnal ilmiah dan lainnya. Peranan TIK juga mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pembelajaran, tanpa mengenal ruang dan waktu. Hal tersebut secara tidak langsung mampu meningkatkan angka pada indikator pengetahuan pembentuk IPM.

Untuk memenuhi kebutuhan data dan indikator TIK Indonesia, BPS merumuskan perhitungan (*ICT Development Index*) Indeks Pembangunan TIK di

tingkat nasional dan provinsi. Indeks Pembangunan TIK telah diterbitkan oleh BPS mulai tahun 2016 dan didasarkan pada metodologi *Internasional Telecommunication Union* (ITU). Indeks Pembangunan TIK merupakan indeks komposit yang mengombinasikan 11 indikator menjadi suatu tolak ukur yang dapat digunakan untuk memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu. Indeks Pembangunan TIK merupakan suatu indeks yang disusun dari tiga subindeks, masing-masing terdiri atas indikator-indikator penyusun subindeks. Subindeks penyusun Indeks Pembangunan TIK, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan dan keahlian (BPS, 2023b).



Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 bahwa rata-rata Indeks Pembangunan TIK provinsi-provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan. Tiga provinsi dengan perolehan nilai Indeks Pembangunan TIK dengan kategori rendah bergerak ketegori sedang, di mana kategori rendah yaitu 2,51-5,00 dan kategori sedang 5,01-7,50. Berikut tiga provinsi tersebut, Provinsi Aceh dengan besaran Indeks Pembangunan TIK 4,89, selanjutnya Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 4,90 nilai indeks dan Lampung sebesar 4,82 nilai indeks. Adapun provinsi lainnya telah menyandang kategori Indeks Pembangunan TIK sedang, dan secara rata-rata mengalami

peningkatan nilai indeks setiap tahunnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwasanya perkembangan setiap subindeks penyusun Indeks Pembangunan TIK yang terdiri dari akses dan infrastruktur TIK, pengguna TIK dan keahlian TIK mengalami peningkatan setiap tahunnya. Provinsi Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan rata-rata nilai Indeks Pembangunan TIK tertinggi di Pulau Sumatera tahun 2019-2023 yaitu sebesar 6,56. Sedangkan, provinsi dengan rata-rata nilai Indeks Pembangunan TIK terendah di Pulau Sumatera tahun 2019-2023 ditempati oleh Provinsi Aceh yaitu sebesar 5,39. Kendati belum terdapat satu pun provinsi di Pulau Sumatera yang tergolong dalam kategori Indeks Pembangunan TIK tinggi, pola pertumbuhan indeks tersebut menunjukkan arah yang positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun di seluruh wilayah. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera akan mencapai kategori tinggi di masa mendatang.

Salah satu indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengeluaran riil per kapita, yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Semakin tinggi pengeluaran riil per kapita, maka semakin tinggi pula taraf kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengeluaran per kapita juga menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan tingkat kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakcukupan kemampuan ekonomi individu untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik yang bersifat makanan maupun non-makanan, yang secara teknis diukur berdasarkan besaran pengeluaran. Dalam konteks statistik, seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan (BPS, 2023c). Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membatasi akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan capaian pembangunan manusia.

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023

PROVINSI	2019		2020		2021		2022		2023	
	IPM	TK	IPM	TK	IPM	TK	IPM	TK	IPM	TK
Aceh	71,90	15,32	73,29	14,99	73,48	15,33	74,11	14,64	74,70	14,45
Perkembangan:			1,39	-0,33	0,19	0,34	0,63	-0,69	0,59	-0,19
Sumatera Utara	71,74	8,83	73,62	8,75	73,84	9,01	74,51	8,42	75,13	8,15
Perkembangan:			1,88	-0,08	0,22	0,26	0,67	-0,59	0,62	-0,27
Sumatera Barat	72,39	6,42	74,29	6,28	74,56	6,63	75,16	5,92	75,64	5,95
Perkembangan:			1,90	-0,14	0,27	0,35	0,60	-0,71	0,48	0,03
Riau	73,00	7,08	73,67	6,82	73,89	7,12	74,45	6,78	74,95	6,68
Perkembangan:			0,67	-0,26	0,22	0,30	0,56	-0,34	0,50	-0,10
Jambi	71,26	7,60	72,29	7,58	72,62	8,09	73,11	7,62	73,73	7,58
Perkembangan:			1,03	-0,02	0,33	0,51	0,49	-0,47	0,62	-0,04
Sumatera Selatan	70,02	12,71	71,62	12,66	71,83	12,84	72,48	11,90	73,18	11,78
Perkembangan:			1,60	-0,05	0,21	0,18	0,65	-0,94	0,70	-0,12
Bengkulu	71,21	15,23	72,93	15,03	73,16	15,22	73,68	14,62	74,30	14,04
Perkembangan:			1,72	-0,20	0,23	0,19	0,52	-0,60	0,62	-0,58
Lampung	69,57	12,62	71,04	12,34	71,25	12,62	71,79	11,57	72,48	11,11
Perkembangan:			1,47	-0,28	0,21	0,28	0,54	-1,05	0,69	-0,46
Kep. Bangka Belitung	71,30	4,62	72,74	4,53	72,96	4,90	73,50	4,45	74,09	4,52
Perkembangan:			1,44	-0,09	0,22	0,37	0,54	-0,45	0,59	0,07
Kep. Riau	75,48	5,90	77,69	5,92	77,87	6,12	78,48	6,24	79,08	5,69
Perkembangan:			2,21	0,02	0,18	0,20	0,61	0,12	0,60	-0,55
Rata-Rata P. Sumatera	71,79	9,63	73,32	9,49	73,55	9,79	74,13	9,22	74,73	9,00

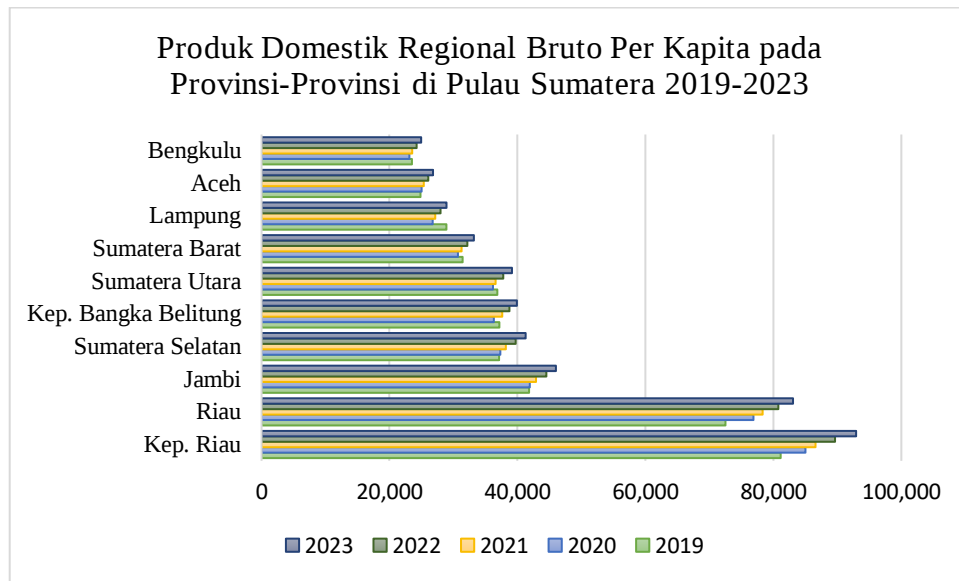
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Secara konseptual kemiskinan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Adam, 2021). Namun, pada data yang ditampilkan pada Tabel 1.1, terdapat fenomena yang cukup unik pada tahun 2021. Berdasarkan perkembangan rata-rata variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan di setiap provinsi, keduanya justru mengalami peningkatan secara bersamaan. Pada tahun 2020, rata-rata IPM di Pulau Sumatera tercatat sebesar 73,32 dan meningkat menjadi 73,55 pada tahun 2021. Di sisi lain, Tingkat Kemiskinan yang sebelumnya sebesar 9,49 persen pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 9,79 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara IPM dan Tingkat Kemiskinan pada periode tersebut, yang bertentangan dengan konsep teoritis yang seharusnya. Fenomena ini diduga merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Pulau Sumatera, sehingga memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Tren pembangunan manusia di Pulau Sumatera secara umum menunjukkan arah yang positif. Seluruh provinsi di wilayah ini mengalami peningkatan nilai IPM

secara konsisten sepanjang periode tahun 2019-2023. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Setelah fenomena unik yang terjadi pada tahun 2021, di mana IPM dan Tingkat Kemiskinan meningkat secara bersamaan, kondisi sosial-ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2022, rata-rata Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera mengalami penurunan, yang menandakan adanya pemulihan ekonomi di tingkat rumah tangga. Tren perbaikan ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana sebagian besar provinsi mencatatkan penurunan Tingkat Kemiskinan yang disertai dengan peningkatan IPM. Hal ini memperkuat dugaan bahwa tahun 2021 merupakan anomali sementara akibat dampak pandemi, dan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya telah mengembalikan keterkaitan negatif antara IPM dan Tingkat Kemiskinan sebagaimana dijelaskan dalam teori pembangunan manusia.

Dalam konteks pembangunan daerah, pembangunan manusia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi perekonomian wilayah tersebut. Salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu (Adam, 2021). Namun, untuk melihat sejauh mana hasil pembangunan ekonomi benar-benar dinikmati oleh masyarakat, indikator yang lebih tepat digunakan adalah PDRB per kapita, karena memperhitungkan jumlah penduduk dalam pengukurannya. Berbeda dengan PDRB total yang hanya menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi suatu daerah, PDRB per kapita mencerminkan nilai ekonomi rata-rata yang diterima oleh setiap individu. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, maka semakin besar pula potensi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses layanan pendidikan maupun kesehatan. Oleh karena itu, PDRB per kapita dianggap lebih representatif dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta memiliki kaitan yang erat dengan dimensi standar hidup dalam IPM.



Gambar 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) Per Kapita pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2019-2023 (Ribu Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Divisualisasikan pada Gambar 1.2, selama lima tahun terakhir yakni pada periode 2019–2023, besaran PDRB per kapita di seluruh provinsi pada wilayah Pulau Sumatera menunjukkan tren positif, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi dengan rata-rata PDRB per kapita tertinggi sebesar 87,61 juta rupiah, disusul oleh Riau sebesar 78,31 juta rupiah, dan Jambi di posisi ketiga dengan 43,43 juta rupiah. Di sisi lain, Provinsi Bengkulu menempati posisi terendah dengan rata-rata PDRB per kapita sebesar 23,87 juta rupiah, diikuti oleh Aceh sebesar 25,62 juta rupiah. Disparitas ini mengindikasikan perbedaan struktur dan kekuatan ekonomi antarprovinsi, di mana provinsi-provinsi dengan sektor industri, migas, dan perdagangan yang kuat cenderung memiliki nilai PDRB per kapita lebih tinggi. Sebaliknya, provinsi dengan ketergantungan tinggi pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan cenderung mencatatkan nilai PDRB yang lebih rendah.

Perbedaan nilai PDRB per kapita antarprovinsi di Pulau Sumatera dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan sektoral yang khas di masing-masing daerah. Provinsi seperti Kepulauan Riau dan Riau memiliki keunggulan pada sektor industri, pertambangan, dan migas, yang menyumbang nilai tambah

besar terhadap perekonomian daerah. Aktivitas ekspor, kehadiran kawasan industri, serta posisi geografis yang strategis turut mendorong tingginya nilai PDRB per kapita. Sementara itu, provinsi seperti Bengkulu dan Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian dan jasa tradisional dengan produktivitas yang relatif rendah, serta infrastruktur ekonomi yang belum merata. Selain itu, tingkat investasi dan kemampuan fiskal daerah juga memengaruhi kecepatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberagaman struktur ekonomi dan kapasitas sumber daya di masing-masing provinsi memainkan peran penting dalam menentukan tinggi rendahnya PDRB per kapita suatu wilayah.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa selama satu dekade terakhir, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera menunjukkan tren yang positif, ditandai dengan peningkatan rata-rata setiap tahunnya. Kemajuan ini tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan mendasar. Provinsi-provinsi dari kawasan timur Indonesia masih mendominasi daftar daerah termiskin pada tahun 2024, diikuti secara mengejutkan oleh dua provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh dan Bengkulu, yang masing-masing menempati peringkat ke-10 dan ke-11 sebagai provinsi termiskin.

Fenomena menarik lainnya adalah ketidaksesuaian antara pertumbuhan IPM dengan penurunan tingkat kemiskinan pada tahun tertentu. Terdapat kecenderungan di mana kenaikan IPM justru diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin, yang secara teoritis bertentangan dengan asumsi dasar bahwa IPM memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi IPM seharusnya diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan. Selain itu, ketimpangan ekonomi antarprovinsi di Pulau Sumatera juga masih nyata terlihat. Hal ini tercermin dari distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang belum merata, di mana sebagian provinsi mencatatkan lonjakan

pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, sementara provinsi lainnya justru mengalami perlambatan, bahkan kontraksi, yang mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan antarwilayah.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, peneliti tertarik dan termotivasi untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia dengan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tingkat Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera pada tahun 2012-2023?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tingkat Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera pada tahun 2012-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tingkat Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera pada tahun 2012-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tingkat Kemiskinan dan Produk

Domestik Regional Bruto Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera pada tahun 2012-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang studi ekonomi pembangunan.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi intelektual bagi para pembaca, khususnya sebagai referensi yang relevan dalam memperkaya wawasan serta memperdalam pemahaman di bidang pembangunan manusia. Temuan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan awal untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai berbagai determinan yang memengaruhi pembangunan manusia di wilayah Pulau Sumatera sepanjang periode 2012-2023.

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang bernilai bagi para pelaku kebijakan maupun praktisi di bidang terkait, khususnya dalam merumuskan strategi pembangunan berbasis data yang valid. Hasil studi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, serta memperkuat efektivitas intervensi dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di Pulau Sumatera. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjangkau kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.